PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR. 11 TAHUN 2011

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
TAHUN ANGGARAN 2012

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 186 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hulu Bersama Bupati Indragiri Hulu telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan Keputusan Gubernur Riau Nomor 1175/XII/2011 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Indragiri Hulu tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2012;

b. bahwa Penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2012.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Priopinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

4.Undang - Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;

13. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;

17.Peraturan.....

17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) ;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503) ;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4570) ;

22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575) ;

23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) ;

24. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577) ;

25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;

26. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585) ;

27. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;

28. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Layanan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD Kepada Masyarakat;

29. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

30.Peraturan.....

30. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

31. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);

32. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

33. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

34. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

41. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2008 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2010 Nomor 3) ;

42. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2008 Nomor 19);

43.Peraturan.....

43. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2011 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
dan
BUPATI INDRAGIRI HULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah.....	Rp.	955.414.631.555,00
2. Belanja Daerah.....	Rp.	1.071.184.684.000,00
Surplus/(Defisit)	**Rp.**	**(115.770.052.445,00)**
3. Pembiayaan Daerah :		
a. Penerimaan	Rp.	137.518.785.427,00
b. Pengeluaran	Rp.	2.000.000.000,00
Pembiayaan Netto	**Rp.**	**135.518.785.427,00**
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	**Rp.**	**19.748.732.982,00**

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah, sejumlah	Rp.	27.282.709.737,00
b. Dana Perimbangan, sejumlah	Rp.	862.495.625.338,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah,sejumlah..	Rp.	65.636.296.480,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hasil Pajak Daerah, sejumlah.....	Rp.	6.660.000.000,00
b. Retribusi Daerah sejumlah.....	Rp.	7.751.878.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Sejumlah.....	Rp.	1.700.000.000,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, Sejumlah	Rp.	11.170.831.737,00

(3).Dana.....

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil, sejumlah..... Rp. 328.558.094.338,00
b. Dana Alokasi Umum, sejumlah..... Rp. 487.476.121.000,00
c. Dana Alokasi Khusus, sejumlah..... Rp. 46.461.410.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah, sejumlah..... Rp. ,00
b. Dana Darurat, sejumlah..... Rp. ,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, sejumlah..... Rp. 29.298.323.000,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, sejumlah..... Rp. 36.337.973.480,00
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya, sejumlah..... Rp. ,00
f. Lain – lain Penerimaan yang sah, sejumlah..... Rp. ,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung, sejumlah..... Rp. 489.950.983.809,00
b. Belanja Langsung, sejumlah..... Rp. 581.233.700.191,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai, sejumlah..... Rp. 417.087.983.809,00
b. Belanja Bunga, sejumlah..... Rp. ,00
c. Belanja Subsidi, sejumlah..... Rp. ,00
d. Belanja Hibah, sejumlah..... Rp. 20.200.000.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial, sejumlah..... Rp. 8.240.000.000,00
f. Belanja Bagi Hasil, sejumlah..... Rp. ,00
g. Belanja Bantuan Keuangan, sejumlah..... Rp. 42.423.000.000,00
h. Belanja Tidak Terduga, sejumlah..... Rp. 2.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai, sejumlah.....Rp. 82.343.080.470,00
b. Belanja Barang dan Jasa, sejumlah..... Rp. 244.733.222.353,00
c. Belanja Modal, sejumlah..... Rp. 254.157.397.368,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan, sejumlah..... Rp. 137.518.785.427,00
b. Pengeluaran, sejumlah..... Rp. 2.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) Sejumlah ..... Rp. 137.518.785.427,00
b. Pencairan Dana Cadangan, sejumlah..... Rp. ,00
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Sejumlah ..... Rp. ,00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah, sejumlah..... Rp. ,00
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah..... Rp. ,00
f. Penerimaan Piutang Daerah, sejumlah ..... Rp. ,00

(3).Pengeluaran.....

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a.	Pembentukan Dana Cadangan, sejumlah.....	Rp.	,00
b.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, sejumlah.....	Rp.	2.000.000.000,00
c.	Pembayaran Pokok Utang, sejumlah.....	Rp.	,00
d.	Pemberian Pinjaman Daerah, sejumlah.....	Rp.	,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekafitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekafitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah Tahun 2012;
8. Lampiran VIII : Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini;
9. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya;
11. Lampiran XI : Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun anggaran ini:
12. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. LampiranXIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati Indragiri Hulu menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Ditetapkan di Rengat
Pada tanggal 27 Desember 2011

BUPATI INDRAGIRI HULU

YOPI ARIANTO

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 27 Desember 2011
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Drs. H. R. ERISMAN, M. Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19550126 198103 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2011 NOMOR 11

DAFTAR ISI

A. PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.....

B. LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012..... 1

C. LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2012..... 3

D. LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012, TERDIRI DARI :

1. Dinas Pendidikan Kabupaten IndragIiri Hulu 8
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hulu..... 13
3. Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat 17
4. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indragiri Hulu 20
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Indragiri Hulu..... 25
6. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indragiri Hulu..... 29
7. Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Indragiri Hulu 32
8. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu 35
9. Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Indragiri Hulu 38
10. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hulu..... 42
11. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hulu..... 47
12. Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Indragiri Hulu 50

14. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Indragiri Hulu 57

15. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Damkar Kabupaten Indragiri Hulu 60

16. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu..... 63

17. Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah 64

18. Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.. 65

19. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu..... 72

20. Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu 76

21. Badan Kepegawaian dan Pendidikan Latihan Kabupaten Indragiri Hulu 79

22. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu 83

23. Kecamatan 87

24. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Indragiri Hulu 126

25. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Indragiri Hulu 129

26. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Indragiri Hulu..... 133

27. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Indragiri Hulu..... 136

28. Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hulu 139

29. Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hulu 142

30. Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Indragiri Hulu 146

31. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hulu 149

32. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Indragiri Hulu 153

E. LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012..... 157

F. LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASARAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM RANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2012.... 221

G. LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN TAHUN ANGGARAN 2012..... 223

H. LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG DAFTAR PIUTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012..... 224

I. LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012..... 225

J. LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012..... 226

K. LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN TAHUN ANGGARAN 2012..... 227

L. LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG DAFTAR KEGIATAN TAHUN - TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM YAHUN ANGGARAN INI TAHUN ANGGARAN 2012..... 228

M. LAMPIRAN XII PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012..... 229

N. LAMPIRAN XIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG DAFTAR PINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012..... 230

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu
Nomor : 11 Tahun 2011
Tanggal : 27 Desember 2011

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

RINGKASAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2012

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
1.	**PENDAPATAN**	**955,414,631,555.00**
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**27,282,709,737.00**
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	6,660,000,000.00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	7,751,878,000.00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1,700,000,000.00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	11,170,831,737.00
1.2	**Dana Perimbangan**	**862,495,625,338.00**
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	328,558,094,338.00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	487,476,121,000.00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	46,461,410,000.00
1.3	**Lain-lain Pendapatan yang Sah**	**65,636,296,480.00**
1.3.1	Pendapatan Hibah	0.00
1.3.2	Dana Darurat	0.00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya	29,298,323,000.00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	36,337,973,480.00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0.00
1.3.6	Lain-Lain Penerimaan yang Sah	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN	**955,414,631,555.00**
2.	**BELANJA**	**1,071,184,684,000.00**
2.1	**Belanja Tidak Langsung**	**489,950,983,809.00**
2.1.1	Belanja Pegawai	417,087,983,809.00
2.1.2	Belanja Bunga	0.00
2.1.3	Belanja Subsidi	0.00
2.1.4	Belanja Hibah	20,200,000,000.00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	8,240,000,000.00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	0.00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	42,423,000,000.00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2,000,000,000.00
2.2	**Belanja Langsung**	**581,233,700,191.00**
2.2.1	Belanja Pegawai	82,397,780,470.00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	244,678,522,353.00
2.2.3	Belanja Modal	254,157,397,368.00
	JUMLAH BELANJA	**1,071,184,684,000.00**
	SURPLUS(DEFISIT)	**(115,770,052,445.00)**
3.	**PEMBIAYAAN**	
3.1	**Penerimaan Pembiayaan Daerah**	**137,518,785,427.00**
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	137,518,785,427.00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0.00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0.00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0.00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0.00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0.00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**137,518,785,427.00**
3.2	**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**	**2,000,000,000.00**
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0.00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2,000,000,000.00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0.00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0.00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**2,000,000,000.00**
	PEMBIAYAAN NETTO	**135,518,785,427.00**
3.3	**SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)**	**19,748,732,982.00**

Rengat, Tanggal 27 Desember 2011

BUPATI INDRAGIRI HULU

YOPI ARIANTO

Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu
Nomor : 11 Tahun 2011
Tanggal : 27 Desember 2011

KABUPATEN INDRAGIRI HULU
RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2012

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1	**URUSAN WAJIB**	**953,707,631,555.00**	**463,439,729,648.85**	**539,044,926,138.00**	**1,002,484,655,786.85**
1.01	**PENDIDIKAN**		**225,389,349,862.19**	**87,265,111,174.00**	**312,654,461,036.19**
1.01.01	Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu		225,389,349,862.19	86,897,696,260.00	312,287,046,122.19
1.24.01	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Indragiri Hulu			367,414,914.00	367,414,914.00
1.02	**KESEHATAN**	**3,826,000,000.00**	**42,613,477,705.67**	**40,646,301,811.00**	**83,259,779,516.67**
1.02.01	Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hulu		27,820,017,098.84	25,745,016,811.00	53,565,033,909.84
1.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat	3,826,000,000.00	14,793,460,606.83	14,901,285,000.00	29,694,745,606.83
1.03	**PEKERJAAN UMUM**	**2,825,000,000.00**	**9,532,804,108.83**	**170,627,246,247.00**	**180,160,050,355.83**
1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indragiri Hulu	2,825,000,000.00	9,532,804,108.83	151,872,358,492.00	161,405,162,600.83
1.22.01	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Indragiri Hulu			176,169,000.00	176,169,000.00
2.07.01	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Indragiri Hulu			18,578,718,755.00	18,578,718,755.00
1.04	**PERUMAHAN**			**5,474,988,401.00**	**5,474,988,401.00**
1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indragiri Hulu			5,368,372,883.00	5,368,372,883.00
1.13.01	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hulu			54,280,518.00	54,280,518.00
1.19.03	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Damkar Kabupaten Indragiri Hulu			52,335,000.00	52,335,000.00
1.05	**PENATAAN RUANG**			**1,068,286,296.00**	**1,068,286,296.00**
1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indragiri Hulu			1,068,286,296.00	1,068,286,296.00
1.06	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN**		**4,878,553,681.00**	**12,144,685,944.00**	**17,023,239,625.00**
1.06.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Indragiri Hulu		4,878,553,681.00	11,664,343,554.00	16,542,897,235.00
1.20.03	Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu			412,722,390.00	412,722,390.00
2.07.01	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Indragiri Hulu			67,620,000.00	67,620,000.00
1.07	**PERHUBUNGAN**	**784,000,000.00**	**2,630,162,792.00**	**4,126,093,610.00**	**6,756,256,402.00**
1.07.01	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indragiri Hulu	784,000,000.00	2,630,162,792.00	4,126,093,610.00	6,756,256,402.00
1.08	**LINGKUNGAN HIDUP**		**2,005,300,163.00**	**8,399,759,880.00**	**10,405,060,043.00**
1.08.02	Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Indragiri Hulu		2,005,300,163.00	2,317,191,096.00	4,322,491,259.00
1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indragiri Hulu			5,782,705,564.00	5,782,705,564.00
2.07.01	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Indragiri Hulu			299,863,220.00	299,863,220.00
1.09	**PERTANAHAN**				
1.10	**KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**	**110,000,000.00**	**2,794,146,798.00**	**7,476,934,367.00**	**10,271,081,165.00**
1.10.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	110,000,000.00	2,794,146,798.00	7,476,934,367.00	10,271,081,165.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Kabupaten Indragiri Hulu				
1.11	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**			**1,250,111,400.00**	**1,250,111,400.00**
1.12.01	Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Indragiri Hulu			1,250,111,400.00	1,250,111,400.00
1.12	**KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA**		**1,775,197,001.00**	**2,798,897,386.00**	**4,574,094,387.00**
1.12.01	Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Indragiri Hulu		1,775,197,001.00	2,798,897,386.00	4,574,094,387.00
1.13	**SOSIAL**		**3,534,493,861.00**	**4,945,859,814.00**	**8,480,353,675.00**
1.13.01	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hulu		3,534,493,861.00	3,622,211,863.00	7,156,705,724.00
1.20.03	Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu			1,323,647,951.00	1,323,647,951.00
1.14	**TENAGA KERJA**			**1,076,594,720.00**	**1,076,594,720.00**
1.13.01	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hulu			1,076,594,720.00	1,076,594,720.00
1.15	**KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**		**2,103,337,097.00**	**2,004,350,152.00**	**4,107,687,249.00**
1.15.01	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hulu		2,103,337,097.00	2,004,350,152.00	4,107,687,249.00
1.16	**PENANAMAN MODAL**		**2,550,214,133.00**	**3,771,514,874.00**	**6,321,729,007.00**
1.16.01	Badan Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Indragiri Hulu		2,550,214,133.00	3,247,499,874.00	5,797,714,007.00
1.22.01	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Indragiri Hulu			524,015,000.00	524,015,000.00
1.17	**KEBUDAYAAN**			**2,724,739,873.00**	**2,724,739,873.00**
1.18.01	Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Indragiri Hulu			2,724,739,873.00	2,724,739,873.00
1.18	**PEMUDA DAN OLAH RAGA**		**2,110,298,057.22**	**10,545,944,464.00**	**12,656,242,521.22**
1.18.01	Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Indragiri Hulu		2,110,298,057.22	10,545,944,464.00	12,656,242,521.22
1.20.03	Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu				
1.19	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI**		**8,226,365,281.00**	**28,177,241,213.00**	**36,403,606,494.00**
1.19.01	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hulu		1,949,583,401.00	3,413,766,000.00	5,363,349,401.00
1.19.03	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Damkar Kabupaten Indragiri Hulu		6,276,781,880.00	7,923,117,613.00	14,199,899,493.00
1.20.03	Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu			16,840,357,600.00	16,840,357,600.00
1.20	**OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN**	**946,162,631,555.00**	**141,305,951,426.81**	**112,685,231,154.00**	**253,991,182,580.81**
1.20.01	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu		9,756,959,009.40		9,756,959,009.40
1.20.02	Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah		504,416,494.85		504,416,494.85
1.20.03	Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu	908,003,430,555.00	95,378,136,078.08	55,670,237,683.00	151,048,373,761.08
1.20.04	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu		2,724,935,351.88	20,688,889,230.00	23,413,824,581.88
1.20.07	Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu		2,777,830,025.51	4,451,289,950.00	7,229,119,975.51
1.20.10	Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu		4,468,574,552.00	12,099,680,272.00	16,568,254,824.00
1.20.11	Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu	38,159,201,000.00	7,861,853,791.00	8,379,240,030.00	16,241,093,821.00
1.20.12	Kecamatan Rengat		3,572,273,708.00	841,678,440.00	4,413,952,148.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1.20.13	Kecamatan Rengat Barat		1,800,161,314.00	681,586,825.00	2,481,748,139.00
1.20.14	Kecamatan Seberida		1,284,106,749.00	678,410,030.00	1,962,516,779.00
1.20.15	Kecamatan Batang Gansal		837,806,159.00	660,712,913.00	1,498,519,072.00
1.20.16	Kecamatan Batang Cenaku		1,179,529,850.90	615,753,535.00	1,795,283,385.90
1.20.17	Kecamatan Lirik		865,437,135.26	636,495,082.00	1,501,932,217.26
1.20.18	Kecamatan Pasir Penyu		2,114,179,113.93	646,975,814.00	2,761,154,927.93
1.20.19	Kecamatan Kelayang		1,060,581,380.00	628,899,500.00	1,689,480,880.00
1.20.20	Kecamatan Peranap		1,728,654,664.00	617,081,000.00	2,345,735,664.00
1.20.21	Kecamatan Kuala Cenaku		810,023,776.00	644,466,305.00	1,454,490,081.00
1.20.22	Kecamatan Sungai Lala		798,091,328.00	655,079,705.00	1,453,171,033.00
1.20.23	Kecamatan Rakit Kulim		458,625,975.00	641,038,200.00	1,099,664,175.00
1.20.24	Kecamatan Batang Peranap		699,125,460.00	641,842,554.00	1,340,968,014.00
1.20.25	Kecamatan Lubuk Batu Jaya		624,649,511.00	671,272,086.00	1,295,921,597.00
1.01.01	Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu			50,000,000.00	50,000,000.00
1.02.01	Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hulu			50,000,000.00	50,000,000.00
1.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat			50,000,000.00	50,000,000.00
1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indragiri Hulu			50,000,000.00	50,000,000.00
1.06.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Indragiri Hulu			50,000,000.00	50,000,000.00
1.07.01	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indragiri Hulu			50,000,000.00	50,000,000.00
1.08.02	Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Indragiri Hulu			50,000,000.00	50,000,000.00
1.10.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu			50,000,000.00	50,000,000.00
1.12.01	Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Indragiri Hulu			50,000,000.00	50,000,000.00
1.13.01	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hulu			50,000,000.00	50,000,000.00
1.15.01	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hulu			50,000,000.00	50,000,000.00
1.16.01	Badan Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Indragiri Hulu			50,000,000.00	50,000,000.00
1.18.01	Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Indragiri Hulu			50,000,000.00	50,000,000.00
1.19.01	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hulu			357,560,000.00	357,560,000.00
1.19.03	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Damkar Kabupaten Indragiri Hulu			395,800,000.00	395,800,000.00
1.21.01	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Indragiri Hulu			50,000,000.00	50,000,000.00
1.22.01	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Indragiri Hulu			331,242,000.00	331,242,000.00
1.24.01	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Indragiri Hulu			50,000,000.00	50,000,000.00
2.01.01	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Indragiri Hulu			50,000,000.00	50,000,000.00
2.01.02	Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hulu			50,000,000.00	50,000,000.00
2.02.01	Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hulu			50,000,000.00	50,000,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
2.03.01	Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Indragiri Hulu			50,000,000.00	50,000,000.00
2.05.01	Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hulu			50,000,000.00	50,000,000.00
2.07.01	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Indragiri Hulu			50,000,000.00	50,000,000.00
1.21	**KETAHANAN PANGAN**		**5,812,406,289.00**	**1,409,327,591.00**	**7,221,733,880.00**
1.21.01	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Indragiri Hulu		5,812,406,289.00	1,409,327,591.00	7,221,733,880.00
1.22	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**		**5,239,093,257.13**	**27,337,251,950.00**	**32,576,345,207.13**
1.22.01	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Indragiri Hulu		5,239,093,257.13	27,337,251,950.00	32,576,345,207.13
1.23	**STATISTIK**			**596,200,700.00**	**596,200,700.00**
1.06.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Indragiri Hulu			596,200,700.00	596,200,700.00
1.24	**KEARSIPAN**		**938,578,135.00**	**1,736,975,027.00**	**2,675,553,162.00**
1.24.01	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Indragiri Hulu		938,578,135.00	1,736,975,027.00	2,675,553,162.00
1.25	**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**			**755,278,090.00**	**755,278,090.00**
1.07.01	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indragiri Hulu			571,178,090.00	571,178,090.00
1.20.03	Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu			184,100,000.00	184,100,000.00
2	**URUSAN PILIHAN**	**1,707,000,000.00**	**26,511,254,160.15**	**42,188,774,053.00**	**68,700,028,213.15**
2.01	**PERTANIAN**	**50,000,000.00**	**9,838,320,063.68**	**19,452,460,429.00**	**29,290,780,492.68**
2.01.01	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Indragiri Hulu	15,000,000.00	4,710,692,567.00	7,173,790,408.00	11,884,482,975.00
2.01.02	Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hulu	35,000,000.00	5,127,627,496.68	5,226,119,600.00	10,353,747,095.68
1.21.01	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Indragiri Hulu			2,195,241,021.00	2,195,241,021.00
2.05.01	Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hulu			4,857,309,400.00	4,857,309,400.00
2.02	**KEHUTANAN**		**5,878,157,282.28**	**7,227,930,255.00**	**13,106,087,537.28**
2.02.01	Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hulu		5,878,157,282.28	7,227,930,255.00	13,106,087,537.28
2.03	**ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**	**1,000,000,000.00**	**2,566,616,290.01**	**5,758,116,944.00**	**8,324,733,234.01**
2.03.01	Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Indragiri Hulu	1,000,000,000.00	2,566,616,290.01	5,758,116,944.00	8,324,733,234.01
2.04	**PARIWISATA**			**754,545,000.00**	**754,545,000.00**
1.18.01	Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Indragiri Hulu			754,545,000.00	754,545,000.00
2.05	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**72,000,000.00**	**4,316,799,767.38**	**3,142,732,400.00**	**7,459,532,167.38**
2.05.01	Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hulu	72,000,000.00	4,316,799,767.38	3,142,732,400.00	7,459,532,167.38
2.06	**PERDAGANGAN**			**1,150,032,000.00**	**1,150,032,000.00**
2.07.01	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Indragiri Hulu			1,150,032,000.00	1,150,032,000.00
2.07	**PERINDUSTRIAN**	**585,000,000.00**	**3,911,360,756.80**	**4,354,546,025.00**	**8,265,906,781.80**
2.07.01	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Indragiri Hulu	585,000,000.00	3,911,360,756.80	4,354,546,025.00	8,265,906,781.80
2.08	**TRANSMIGRASI**			**348,411,000.00**	**348,411,000.00**

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1.13.01	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hulu			348,411,000.00	348,411,000.00
	JUMLAH	**955,414,631,555.00**	**489,950,983,809.00**	**581,233,700,191.00**	**1,071,184,684,000.00**
	SURPLUS/(DEFISIT)				**115,770,052,445.00**
		PEMBIAYAAN			**SILPA TAB**
		PENERIMAAN	**PENGELUARAN**	**PEMBIAYAAN NETTO**	
1.20	**PEMERINTAHAN UMUM**	**137,518,785,427.00**	**2,000,000,000.00**	**135,518,785,427.00**	**19,748,732,982.00**
1.20.03	Sekretariat Daerah	137,518,785,427.00	2,000,000,000.00	135,518,785,427.00	19,748,732,982.00

Rengat, Tanggal 27 Desember 2011

BUPATI INDRAGIRI HULU

YOPI ARIANTO

KABUPATEN INDRAGIRI HULU
RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN TAHUN ANGGARAN 2012

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 - Urusan Wajib PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.01 - Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1							2	3	4
1.01	**1.01.01**	**00**	**00**				**Pendapatan Daerah**		
1.01	**1.01.01**	**00**	**00**	**5**			**Belanja Daerah**	**312,337,046,122.19**	
1.01	**1.01.01**	**00**	**00**	**5**	**1**		**Belanja Tidak Langsung**	**225,389,349,862.19**	
1.01	1.01.01	00	00	5	1	1	Belanja Pegawai	225,389,349,862.19	
	1.01.01	**00**	**00**	**5**	**2**		**Belanja Langsung**	**86,947,696,260.00**	
1.01	**1.01.01**	**00**	**00**	**5**	**2**		**Belanja Langsung Urusan Wajib PENDIDIKAN**	**86,897,696,260.00**	
1.01	**1.01.01**	**01**					**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**26,023,763,900.00**	
1.01	1.01.01	01	1.				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	86,897,696,260.00	
1.01	1.01.01	01	01	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	269,425,000.00	
1.01	1.01.01	01	02	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	661,740,300.00	
1.01	1.01.01	01	08	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	626,557,500.00	
1.01	1.01.01	01	10	5	2	1	Belanja Pegawai	8,000,000.00	
1.01	1.01.01	01	10	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	6,027,095,000.00	
1.01	1.01.01	01	11	5	2	1	Belanja Pegawai	8,000,000.00	
1.01	1.01.01	01	11	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	1,705,968,600.00	
1.01	1.01.01	01	12	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	302,044,000.00	
1.01	1.01.01	01	15	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	78,000,000.00	
1.01	1.01.01	01	17	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	460,615,500.00	
1.01	1.01.01	01	18	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	655,518,000.00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1							2	3	4
1.01	1.01.01	01	19	5	2	1	Belanja Pegawai	15,149,700,000.00	
1.01	1.01.01	01	20	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	71,100,000.00	
1.01	**1.01.01**	**02**					**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**1,885,908,029.00**	
1.01	1.01.01	02	03	5	2	1	Belanja Pegawai	16,600,000.00	
1.01	1.01.01	02	03	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	19,758,745.00	
1.01	1.01.01	02	03	5	2	3	Belanja Modal	486,761,534.00	
1.01	1.01.01	02	05	5	2	1	Belanja Pegawai	6,200,000.00	
1.01	1.01.01	02	05	5	2	3	Belanja Modal	594,000,000.00	
1.01	1.01.01	02	07	5	2	1	Belanja Pegawai	1,700,000.00	
1.01	1.01.01	02	07	5	2	3	Belanja Modal	40,216,750.00	
1.01	1.01.01	02	20	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	16,671,000.00	
1.01	1.01.01	02	22	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	274,000,000.00	
1.01	1.01.01	02	24	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	280,000,000.00	
1.01	1.01.01	02	26	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	150,000,000.00	
1.01	**1.01.01**	**06**					**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**8,000,000.00**	
1.01	1.01.01	06	01	5	2	1	Belanja Pegawai	8,000,000.00	
1.01	**1.01.01**	**15**					**Program Pendidikan Anak Usia Dini**	**980,094,133.00**	
1.01	1.01.01	15	03	5	2	1	Belanja Pegawai	12,800,000.00	
1.01	1.01.01	15	03	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	9,718,098.00	
1.01	1.01.01	15	03	5	2	3	Belanja Modal	423,700,000.00	
1.01	1.01.01	15	19	5	2	1	Belanja Pegawai	8,600,000.00	
1.01	1.01.01	15	19	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	8,945,200.00	
1.01	1.01.01	15	19	5	2	3	Belanja Modal	49,006,320.00	
1.01	1.01.01	15	57	5	2	1	Belanja Pegawai	44,225,000.00	
1.01	1.01.01	15	57	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	181,155,665.00	
1.01	1.01.01	15	62	5	2	1	Belanja Pegawai	25,425,000.00	
1.01	1.01.01	15	62	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	71,426,300.00	
1.01	1.01.01	15	63	5	2	1	Belanja Pegawai	28,975,000.00	
1.01	1.01.01	15	63	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	116,117,550.00	
1.01	**1.01.01**	**16**					**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	**47,223,242,189.00**	
1.01	1.01.01	16	01	5	2	1	Belanja Pegawai	16,600,000.00	
1.01	1.01.01	16	01	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	73,916,000.00	
1.01	1.01.01	16	01	5	2	3	Belanja Modal	3,299,941,302.00	
1.01	1.01.01	16	03	5	2	1	Belanja Pegawai	20,100,000.00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1							2	3	4
1.01	1.01.01	16	03	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	117,769,245.00	
1.01	1.01.01	16	03	5	2	3	Belanja Modal	4,331,875,000.00	
1.01	1.01.01	16	09	5	2	1	Belanja Pegawai	16,600,000.00	
1.01	1.01.01	16	09	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	36,839,245.00	
1.01	1.01.01	16	09	5	2	3	Belanja Modal	803,772,000.00	
1.01	1.01.01	16	19	5	2	1	Belanja Pegawai	13,100,000.00	
1.01	1.01.01	16	19	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	15,443,250.00	
1.01	1.01.01	16	19	5	2	3	Belanja Modal	1,301,080,000.00	
1.01	1.01.01	16	20	5	2	1	Belanja Pegawai	13,100,000.00	
1.01	1.01.01	16	20	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	1,663,250.00	
1.01	1.01.01	16	20	5	2	3	Belanja Modal	324,877,900.00	
1.01	1.01.01	16	44	5	2	1	Belanja Pegawai	16,600,000.00	
1.01	1.01.01	16	44	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	114,140,647.00	
1.01	1.01.01	16	44	5	2	3	Belanja Modal	3,503,645,000.00	
1.01	1.01.01	16	57	5	2	1	Belanja Pegawai	86,025,000.00	
1.01	1.01.01	16	57	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	162,785,200.00	
1.01	1.01.01	16	58	5	2	1	Belanja Pegawai	216,725,000.00	
1.01	1.01.01	16	58	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	586,195,000.00	
1.01	1.01.01	16	58	5	2	3	Belanja Modal	160,000.00	
1.01	1.01.01	16	59	5	2	1	Belanja Pegawai	28,725,000.00	
1.01	1.01.01	16	59	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	77,603,000.00	
1.01	1.01.01	16	63	5	2	1	Belanja Pegawai	51,063,000.00	
1.01	1.01.01	16	63	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	116,701,600.00	
1.01	1.01.01	16	66	5	2	1	Belanja Pegawai	21,600,000.00	
1.01	1.01.01	16	66	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	439,943,250.00	
1.01	1.01.01	16	66	5	2	3	Belanja Modal	29,876,862,000.00	
1.01	1.01.01	16	70	5	2	1	Belanja Pegawai	120,050,000.00	
1.01	1.01.01	16	70	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	333,587,000.00	
1.01	1.01.01	16	75	5	2	1	Belanja Pegawai	540,000,000.00	
1.01	1.01.01	16	78	5	2	1	Belanja Pegawai	245,625,000.00	
1.01	1.01.01	16	78	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	298,529,300.00	
1.01	**1.01.01**	**17**					**Program Pendidikan Menengah**	**7,456,626,263.00**	
1.01	1.01.01	17	01	5	2	1	Belanja Pegawai	17,000,000.00	
1.01	1.01.01	17	01	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	97,377,720.00	
1.01	1.01.01	17	01	5	2	3	Belanja Modal	3,103,865,000.00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1							2	3	4
1.01	1.01.01	17	09	5	2	1	Belanja Pegawai	13,300,000.00	
1.01	1.01.01	17	09	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	20,090,098.00	
1.01	1.01.01	17	09	5	2	3	Belanja Modal	515,310,000.00	
1.01	1.01.01	17	19	5	2	1	Belanja Pegawai	12,700,000.00	
1.01	1.01.01	17	19	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	6,973,250.00	
1.01	1.01.01	17	19	5	2	3	Belanja Modal	593,896,770.00	
1.01	1.01.01	17	57	5	2	1	Belanja Pegawai	45,475,000.00	
1.01	1.01.01	17	57	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	139,218,000.00	
1.01	1.01.01	17	58	5	2	1	Belanja Pegawai	71,417,750.00	
1.01	1.01.01	17	58	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	220,541,550.00	
1.01	1.01.01	17	63	5	2	1	Belanja Pegawai	44,900,000.00	
1.01	1.01.01	17	63	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	24,675,925.00	
1.01	1.01.01	17	64	5	2	1	Belanja Pegawai	79,575,000.00	
1.01	1.01.01	17	64	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	214,448,650.00	
1.01	1.01.01	17	67	5	2	1	Belanja Pegawai	230,850,000.00	
1.01	1.01.01	17	67	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	953,216,250.00	
1.01	1.01.01	17	67	5	2	3	Belanja Modal	28,760,000.00	
1.01	1.01.01	17	70	5	2	1	Belanja Pegawai	343,375,000.00	
1.01	1.01.01	17	70	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	663,858,300.00	
1.01	1.01.01	17	70	5	2	3	Belanja Modal	15,802,000.00	
1.01	**1.01.01**	**18**					**Program Pendidikan Non Formal**	**770,607,025.00**	
1.01	1.01.01	18	01	5	2	1	Belanja Pegawai	14,925,000.00	
1.01	1.01.01	18	01	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	101,209,400.00	
1.01	1.01.01	18	02	5	2	1	Belanja Pegawai	218,000,000.00	
1.01	1.01.01	18	02	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	28,702,000.00	
1.01	1.01.01	18	03	5	2	1	Belanja Pegawai	23,825,000.00	
1.01	1.01.01	18	03	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	73,387,375.00	
1.01	1.01.01	18	05	5	2	1	Belanja Pegawai	50,550,000.00	
1.01	1.01.01	18	05	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	83,776,500.00	
1.01	1.01.01	18	13	5	2	1	Belanja Pegawai	101,150,000.00	
1.01	1.01.01	18	13	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	75,081,750.00	
1.01	**1.01.01**	**20**					**Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan**	**986,612,721.00**	
1.01	1.01.01	20	01	5	2	1	Belanja Pegawai	25,575,000.00	
1.01	1.01.01	20	01	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	53,970,625.00	
1.01	1.01.01	20	03	5	2	1	Belanja Pegawai	62,825,000.00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1							2	3	4
1.01	1.01.01	20	03	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	146,438,500.00	
1.01	1.01.01	20	07	5	2	1	Belanja Pegawai	296,000,000.00	
1.01	1.01.01	20	07	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	25,235,221.00	
1.01	1.01.01	20	08	5	2	1	Belanja Pegawai	34,000,000.00	
1.01	1.01.01	20	08	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	69,976,950.00	
1.01	1.01.01	20	10	5	2	1	Belanja Pegawai	163,725,000.00	
1.01	1.01.01	20	10	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	108,866,425.00	
1.01	**1.01.01**	**21**					**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**	**78,925,000.00**	
1.01	1.01.01	21	02	5	2	1	Belanja Pegawai	31,325,000.00	
1.01	1.01.01	21	02	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	47,600,000.00	
1.01	**1.01.01**	**22**					**Program Manajemen Pelayanan Pendidikan**	**1,483,917,000.00**	
1.01	1.01.01	22	01	5	2	1	Belanja Pegawai	625,975,000.00	
1.01	1.01.01	22	01	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	264,726,300.00	
1.01	1.01.01	22	02	5	2	1	Belanja Pegawai	19,325,000.00	
1.01	1.01.01	22	02	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	90,953,300.00	
1.01	1.01.01	22	07	5	2	1	Belanja Pegawai	25,350,000.00	
1.01	1.01.01	22	07	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	148,351,400.00	
1.01	1.01.01	22	09	5	2	1	Belanja Pegawai	6,500,000.00	
1.01	1.01.01	22	09	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	302,736,000.00	
1.20	**1.01.01**	**00**	**00**	**5**	**2**		**Belanja Langsung Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan**	**50,000,000.00**	
1.20	**1.01.01**	**17**					**Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**50,000,000.00**	
1.20	1.01.01	17	1.				Implementasi Sistem Informasi Manajemen Tata Usaha Keuangan Dinas Daerah	50,000,000.00	
1.20	1.01.01	17	45	5	2	1	Belanja Pegawai	1,700,000.00	
1.20	1.01.01	17	45	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	48,300,000.00	
							Jumlah Belanja	**312,337,046,122.19**	
							Surplus / (Defisit)	**(312,337,046,122.19)**	
1.01	**1.01.01**	**00**	**00**				**Pembiayaan Daerah**		

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 - Urusan Wajib KESEHATAN

ORGANISASI : 1.02.01 - Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hulu

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1							2	3	4
1.02	**1.02.01**	**00**	**00**				**Pendapatan Daerah**		
1.02	**1.02.01**	**00**	**00**	**5**			**Belanja Daerah**	**53,615,033,909.84**	
1.02	**1.02.01**	**00**	**00**	**5**	**1**		**Belanja Tidak Langsung**	**27,820,017,098.84**	
1.02	1.02.01	00	00	5	1	1	Belanja Pegawai	27,820,017,098.84	Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2005 tentang Perubahan Ke-7 atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1997 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
	1.02.01	**00**	**00**	**5**	**2**		**Belanja Langsung**	**25,795,016,811.00**	
1.02	**1.02.01**	**00**	**00**	**5**	**2**		**Belanja Langsung Urusan Wajib KESEHATAN**	**25,745,016,811.00**	
1.02	**1.02.01**	**01**					**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**3,004,401,277.00**	
1.02	1.02.01	01	1.				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25,745,016,811.00	
1.02	1.02.01	01	01	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	12,000,000.00	
1.02	1.02.01	01	02	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	225,000,000.00	
1.02	1.02.01	01	06	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	155,500,000.00	
1.02	1.02.01	01	08	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	33,171,108.00	
1.02	1.02.01	01	10	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	89,512,569.00	
1.02	1.02.01	01	11	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	159,708,440.00	
1.02	1.02.01	01	12	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	32,053,160.00	
1.02	1.02.01	01	15	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	83,800,000.00	
1.02	1.02.01	01	17	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	78,605,000.00	
1.02	1.02.01	01	18	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	801,326,000.00	
1.02	1.02.01	01	19	5	2	1	Belanja Pegawai	1,242,100,000.00	
1.02	1.02.01	01	20	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	91,625,000.00	
1.02	**1.02.01**	**02**					**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**2,351,488,000.00**	
1.02	1.02.01	02	05	5	2	1	Belanja Pegawai	14,100,000.00	
1.02	1.02.01	02	05	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	4,121,300.00	
1.02	1.02.01	02	05	5	2	3	Belanja Modal	469,477,800.00	
1.02	1.02.01	02	07	5	2	1	Belanja Pegawai	17,100,000.00	
1.02	1.02.01	02	07	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	222,759,100.00	
1.02	1.02.01	02	07	5	2	3	Belanja Modal	1,152,910,000.00	
1.02	1.02.01	02	28	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	34,500,000.00	
1.02	1.02.01	02	42	5	2	1	Belanja Pegawai	15,600,000.00	
1.02	1.02.01	02	42	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	420,919,800.00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1							2	3	4
1.02	**1.02.01**	**03**					**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**139,700,000.00**	
1.02	1.02.01	03	02	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	139,700,000.00	
1.02	**1.02.01**	**05**					**Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**	**344,708,588.00**	
1.02	1.02.01	05	01	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	239,600,000.00	
1.02	1.02.01	05	02	5	2	1	Belanja Pegawai	35,025,000.00	
1.02	1.02.01	05	02	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	70,083,588.00	
1.02	**1.02.01**	**06**					**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**15,050,000.00**	
1.02	1.02.01	06	01	5	2	1	Belanja Pegawai	8,000,000.00	
1.02	1.02.01	06	02	5	2	1	Belanja Pegawai	2,350,000.00	
1.02	1.02.01	06	03	5	2	1	Belanja Pegawai	2,350,000.00	
1.02	1.02.01	06	04	5	2	1	Belanja Pegawai	2,350,000.00	
1.02	**1.02.01**	**15**					**Program Obat dan Perbekalan Kesehatan**	**3,146,866,800.00**	
1.02	1.02.01	15	01	5	2	1	Belanja Pegawai	20,175,000.00	
1.02	1.02.01	15	01	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	3,126,691,800.00	
1.02	**1.02.01**	**16**					**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	**12,286,478,636.00**	
1.02	1.02.01	16	03	5	2	1	Belanja Pegawai	23,700,000.00	
1.02	1.02.01	16	03	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	507,683,800.00	
1.02	1.02.01	16	03	5	2	3	Belanja Modal	6,024,000,000.00	
1.02	1.02.01	16	06	5	2	1	Belanja Pegawai	900,000.00	
1.02	1.02.01	16	06	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	650,603,986.00	
1.02	1.02.01	16	07	5	2	1	Belanja Pegawai	20,100,000.00	
1.02	1.02.01	16	07	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	54,388,000.00	
1.02	1.02.01	16	07	5	2	3	Belanja Modal	2,620,000,000.00	
1.02	1.02.01	16	09	5	2	1	Belanja Pegawai	301,925,000.00	
1.02	1.02.01	16	09	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	227,533,000.00	
1.02	1.02.01	16	11	5	2	1	Belanja Pegawai	161,282,000.00	
1.02	1.02.01	16	11	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	1,694,362,850.00	
1.02	**1.02.01**	**19**					**Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat**	**229,609,350.00**	
1.02	1.02.01	19	02	5	2	1	Belanja Pegawai	23,075,000.00	
1.02	1.02.01	19	02	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	206,534,350.00	
1.02	**1.02.01**	**20**					**Program Perbaikan Gizi Masyarakat**	**818,695,500.00**	
1.02	1.02.01	20	02	5	2	1	Belanja Pegawai	32,600,000.00	
1.02	1.02.01	20	02	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	306,215,500.00	
1.02	1.02.01	20	04	5	2	1	Belanja Pegawai	49,950,000.00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1							2	3	4
1.02	1.02.01	20	04	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	157,530,000.00	
1.02	1.02.01	20	04	5	2	3	Belanja Modal	272,400,000.00	
1.02	**1.02.01**	**21**					**Program Pengembangan Lingkungan Sehat**	**564,861,512.00**	
1.02	1.02.01	21	01	5	2	1	Belanja Pegawai	89,400,000.00	
1.02	1.02.01	21	01	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	143,480,800.00	
1.02	1.02.01	21	02	5	2	1	Belanja Pegawai	21,500,000.00	
1.02	1.02.01	21	02	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	212,430,850.00	
1.02	1.02.01	21	03	5	2	1	Belanja Pegawai	23,000,000.00	
1.02	1.02.01	21	03	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	75,049,862.00	
1.02	**1.02.01**	**22**					**Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular**	**636,208,539.00**	
1.02	1.02.01	22	01	5	2	1	Belanja Pegawai	83,000,000.00	
1.02	1.02.01	22	01	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	195,123,000.00	
1.02	1.02.01	22	05	5	2	1	Belanja Pegawai	64,400,000.00	
1.02	1.02.01	22	05	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	118,093,000.00	
1.02	1.02.01	22	05	5	2	3	Belanja Modal	15,575,000.00	
1.02	1.02.01	22	08	5	2	1	Belanja Pegawai	42,920,000.00	
1.02	1.02.01	22	08	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	33,247,000.00	
1.02	1.02.01	22	09	5	2	1	Belanja Pegawai	29,580,000.00	
1.02	1.02.01	22	09	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	54,270,539.00	
1.02	**1.02.01**	**23**					**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**	**231,742,476.00**	
1.02	1.02.01	23	03	5	2	1	Belanja Pegawai	8,450,000.00	
1.02	1.02.01	23	03	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	56,183,000.00	
1.02	1.02.01	23	06	5	2	1	Belanja Pegawai	8,300,000.00	
1.02	1.02.01	23	06	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	51,925,500.00	
1.02	1.02.01	23	07	5	2	1	Belanja Pegawai	9,500,000.00	
1.02	1.02.01	23	07	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	97,383,976.00	
1.02	**1.02.01**	**25**					**Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya**	**1,169,595,000.00**	
1.02	1.02.01	25	24	5	2	1	Belanja Pegawai	9,500,000.00	
1.02	1.02.01	25	24	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	1,160,095,000.00	
1.02	**1.02.01**	**28**					**Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan**	**38,028,200.00**	
1.02	1.02.01	28	09	5	2	1	Belanja Pegawai	6,775,000.00	
1.02	1.02.01	28	09	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	31,253,200.00	
1.02	**1.02.01**	**29**					**Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita**	**498,268,775.00**	
1.02	1.02.01	29	01	5	2	1	Belanja Pegawai	20,125,000.00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1							2	3	4
1.02	1.02.01	29	01	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	53,982,925.00	
1.02	1.02.01	29	04	5	2	1	Belanja Pegawai	30,150,000.00	
1.02	1.02.01	29	04	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	394,010,850.00	
1.02	**1.02.01**	**31**					**Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan**	**75,400,222.00**	
1.02	1.02.01	31	01	5	2	1	Belanja Pegawai	16,800,000.00	
1.02	1.02.01	31	01	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	58,600,222.00	
1.02	**1.02.01**	**32**					**Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak**	**193,913,936.00**	
1.02	1.02.01	32	02	5	2	1	Belanja Pegawai	25,300,000.00	
1.02	1.02.01	32	02	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	168,613,936.00	
1.20	**1.02.01**	**00**	**00**	**5**	**2**		**Belanja Langsung Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan**	**50,000,000.00**	
1.20	**1.02.01**	**17**					**Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**50,000,000.00**	
1.20	1.02.01	17	1.				Implementasi Sistem Informasi Manajemen Tata Usaha Keuangan Dinas Daerah	50,000,000.00	
1.20	1.02.01	17	45	5	2	1	Belanja Pegawai	1,700,000.00	
1.20	1.02.01	17	45	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	48,300,000.00	
							Jumlah Belanja	**53,615,033,909.84**	
							Surplus / (Defisit)	**(53,615,033,909.84)**	
1.02	**1.02.01**	**00**	**00**				**Pembiayaan Daerah**		

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 - Urusan Wajib KESEHATAN

ORGANISASI : 1.02.02 - Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1							2	3	4
1.02	**1.02.02**	**00**	**00**	**4**			**Pendapatan Daerah**	**3,826,000,000.00**	
1.02	**1.02.02**	**00**	**00**	**4**	**1**		**Pendapatan Asli Daerah**	**3,826,000,000.00**	
1.02	1.02.02	00	00	4	1	4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	3,826,000,000.00	
							Jumlah Pendapatan	**3,826,000,000.00**	
1.02	**1.02.02**	**00**	**00**	**5**			**Belanja Daerah**	**29,744,745,606.83**	
1.02	**1.02.02**	**00**	**00**	**5**	**1**		**Belanja Tidak Langsung**	**14,793,460,606.83**	
1.02	1.02.02	00	00	5	1	1	Belanja Pegawai	14,793,460,606.83	Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2005 tentang Perubahan Ke-7 atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1997 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
	1.02.02	**00**	**00**	**5**	**2**		**Belanja Langsung**	**14,951,285,000.00**	
1.02	**1.02.02**	**00**	**00**	**5**	**2**		**Belanja Langsung Urusan Wajib KESEHATAN**	**14,901,285,000.00**	
1.02	**1.02.02**	**01**					**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**4,040,963,000.00**	
1.02	1.02.02	01	2.				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14,901,285,000.00	
1.02	1.02.02	01	01	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	4,940,000.00	
1.02	1.02.02	01	02	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	516,000,000.00	
1.02	1.02.02	01	06	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	217,400,000.00	
1.02	1.02.02	01	08	5	2	1	Belanja Pegawai	422,300,000.00	
1.02	1.02.02	01	08	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	302,000,000.00	
1.02	1.02.02	01	09	5	2	1	Belanja Pegawai	11,300,000.00	
1.02	1.02.02	01	09	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	295,200,000.00	
1.02	1.02.02	01	10	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	93,403,500.00	
1.02	1.02.02	01	11	5	2	1	Belanja Pegawai	3,300,000.00	
1.02	1.02.02	01	11	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	60,780,000.00	
1.02	1.02.02	01	12	5	2	1	Belanja Pegawai	2,400,000.00	
1.02	1.02.02	01	12	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	48,363,000.00	
1.02	1.02.02	01	12	5	2	3	Belanja Modal	16,353,000.00	
1.02	1.02.02	01	13	5	2	1	Belanja Pegawai	6,200,000.00	
1.02	1.02.02	01	13	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	1,000,000.00	
1.02	1.02.02	01	13	5	2	3	Belanja Modal	399,818,000.00	
1.02	1.02.02	01	15	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	19,910,500.00	
1.02	1.02.02	01	17	5	2	1	Belanja Pegawai	14,300,000.00	
1.02	1.02.02	01	17	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	635,250,000.00	
1.02	1.02.02	01	18	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	401,145,000.00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1							2	3	4
1.02	1.02.02	01	19	5	2	1	Belanja Pegawai	569,600,000.00	
1.02	**1.02.02**	**02**					**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**782,630,000.00**	
1.02	1.02.02	02	22	5	2	1	Belanja Pegawai	11,300,000.00	
1.02	1.02.02	02	22	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	771,330,000.00	
1.02	**1.02.02**	**05**					**Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**	**357,663,000.00**	
1.02	1.02.02	05	01	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	326,000,000.00	
1.02	1.02.02	05	03	5	2	1	Belanja Pegawai	18,250,000.00	
1.02	1.02.02	05	03	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	13,413,000.00	
1.02	**1.02.02**	**06**					**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**21,000,000.00**	
1.02	1.02.02	06	01	5	2	1	Belanja Pegawai	7,000,000.00	
1.02	1.02.02	06	02	5	2	1	Belanja Pegawai	7,000,000.00	
1.02	1.02.02	06	03	5	2	1	Belanja Pegawai	7,000,000.00	
1.02	**1.02.02**	**16**					**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	**3,938,572,000.00**	
1.02	1.02.02	16	06	5	2	1	Belanja Pegawai	94,200,000.00	
1.02	1.02.02	16	06	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	218,437,000.00	
1.02	1.02.02	16	16	5	2	1	Belanja Pegawai	1,225,935,000.00	
1.02	1.02.02	16	16	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	2,400,000,000.00	
1.02	**1.02.02**	**23**					**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**	**49,850,000.00**	
1.02	1.02.02	23	03	5	2	1	Belanja Pegawai	36,500,000.00	
1.02	1.02.02	23	03	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	13,350,000.00	
1.02	**1.02.02**	**26**					**Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata**	**3,635,715,000.00**	
1.02	1.02.02	26	18	5	2	1	Belanja Pegawai	12,700,000.00	
1.02	1.02.02	26	18	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	500,000.00	
1.02	1.02.02	26	18	5	2	3	Belanja Modal	750,000,000.00	
1.02	1.02.02	26	19	5	2	1	Belanja Pegawai	14,200,000.00	
1.02	1.02.02	26	19	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	2,451,500,000.00	
1.02	1.02.02	26	22	5	2	1	Belanja Pegawai	9,800,000.00	
1.02	1.02.02	26	22	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	14,850,000.00	
1.02	1.02.02	26	22	5	2	3	Belanja Modal	25,750,000.00	
1.02	1.02.02	26	23	5	2	1	Belanja Pegawai	3,300,000.00	
1.02	1.02.02	26	23	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	97,800,000.00	
1.02	1.02.02	26	24	5	2	1	Belanja Pegawai	11,300,000.00	
1.02	1.02.02	26	24	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	244,015,000.00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1							2	3	4
1.02	**1.02.02**	**27**					**Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata**	**2,008,892,000.00**	
1.02	1.02.02	27	04	5	2	1	Belanja Pegawai	17,200,000.00	
1.02	1.02.02	27	04	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	1,655,792,000.00	
1.02	1.02.02	27	16	5	2	1	Belanja Pegawai	13,400,000.00	
1.02	1.02.02	27	16	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	322,500,000.00	
1.02	**1.02.02**	**28**					**Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan**	**66,000,000.00**	
1.02	1.02.02	28	06	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	66,000,000.00	
1.20	**1.02.02**	**00**	**00**	**5**	**2**		**Belanja Langsung Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan**	**50,000,000.00**	
1.20	**1.02.02**	**17**					**Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**50,000,000.00**	
1.20	1.02.02	17	2.				Implementasi Sistem Informasi Manajemen Tata Usaha Keuangan Dinas Daerah	50,000,000.00	
1.20	1.02.02	17	45	5	2	1	Belanja Pegawai	1,700,000.00	
1.20	1.02.02	17	45	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	48,300,000.00	
							Jumlah Belanja	**29,744,745,606.83**	
							Surplus / (Defisit)	**(25,918,745,606.83)**	
1.02	**1.02.02**	**00**	**00**				**Pembiayaan Daerah**		

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03 - Urusan Wajib PEKERJAAN UMUM

ORGANISASI : 1.03.01 - Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indragiri Hulu

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1							2	3	4
1.03	**1.03.01**	**00**	**00**	**4**			**Pendapatan Daerah**	**2,825,000,000.00**	
1.03	**1.03.01**	**00**	**00**	**4**	**1**		**Pendapatan Asli Daerah**	**2,825,000,000.00**	
1.03	1.03.01	00	00	4	1	2	Hasil Retribusi Daerah	2,825,000,000.00	
							Jumlah Pendapatan	**2,825,000,000.00**	
1.03	**1.03.01**	**00**	**00**	**5**			**Belanja Daerah**	**173,674,527,343.83**	
1.03	**1.03.01**	**00**	**00**	**5**	**1**		**Belanja Tidak Langsung**	**9,532,804,108.83**	
1.03	1.03.01	00	00	5	1	1	Belanja Pegawai	9,532,804,108.83	Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2005 tentang Perubahan Ke-7 atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1997 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
	1.03.01	**00**	**00**	**5**	**2**		**Belanja Langsung**	**164,141,723,235.00**	
1.03	**1.03.01**	**00**	**00**	**5**	**2**		**Belanja Langsung Urusan Wajib PEKERJAAN UMUM**	**151,872,358,492.00**	
1.03	**1.03.01**	**01**					**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**1,416,328,030.00**	
1.03	1.03.01	01	1.				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	151,872,358,492.00	
1.03	1.03.01	01	01	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	5,400,000.00	
1.03	1.03.01	01	02	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	98,400,000.00	
1.03	1.03.01	01	08	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	25,613,700.00	
1.03	1.03.01	01	09	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	34,200,000.00	
1.03	1.03.01	01	10	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	48,136,610.00	
1.03	1.03.01	01	11	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	39,545,104.00	
1.03	1.03.01	01	12	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	58,491,616.00	
1.03	1.03.01	01	15	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	32,400,000.00	
1.03	1.03.01	01	17	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	47,250,000.00	
1.03	1.03.01	01	18	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	431,791,000.00	
1.03	1.03.01	01	19	5	2	1	Belanja Pegawai	562,000,000.00	
1.03	1.03.01	01	20	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	33,100,000.00	
1.03	**1.03.01**	**02**					**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**47,958,483,264.00**	
1.03	1.03.01	02	03	5	2	1	Belanja Pegawai	34,100,000.00	
1.03	1.03.01	02	03	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	2,824,383,264.00	
1.03	1.03.01	02	03	5	2	3	Belanja Modal	45,040,000,000.00	Kecamatan Rengat, Rengat Barat, Lirik dan Pasir Penyu.
1.03	1.03.01	02	24	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	60,000,000.00	
1.03	**1.03.01**	**03**					**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**110,400,000.00**	
1.03	1.03.01	03	02	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	24,000,000.00	
1.03	1.03.01	03	05	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	86,400,000.00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1							2	3	4
1.03	**1.03.01**	**05**					**Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**	**227,689,900.00**	
1.03	1.03.01	05	03	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	227,689,900.00	
1.03	**1.03.01**	**06**					**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**15,050,000.00**	
1.03	1.03.01	06	01	5	2	1	Belanja Pegawai	6,500,000.00	
1.03	1.03.01	06	02	5	2	1	Belanja Pegawai	2,850,000.00	
1.03	1.03.01	06	03	5	2	1	Belanja Pegawai	2,850,000.00	
1.03	1.03.01	06	04	5	2	1	Belanja Pegawai	2,850,000.00	
1.03	**1.03.01**	**15**					**Program Pembangunan Jalan dan Jembatan**	**34,934,869,800.00**	
1.03	1.03.01	15	03	5	2	1	Belanja Pegawai	27,600,000.00	
1.03	1.03.01	15	03	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	668,995,135.00	
1.03	1.03.01	15	03	5	2	3	Belanja Modal	26,350,609,545.00	Kecamatan Rengat, Rengat Barat, Kuala Cenaku, Seberida, Batang Gansal, Batang Cenaku, Lirik, Pasir Penyu, Sungai Lala, Lubuk Batu jaya, Rakit Kulim, Kelayang, Peranap, Batang Peranap
1.03	1.03.01	15	05	5	2	1	Belanja Pegawai	27,850,000.00	
1.03	1.03.01	15	05	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	805,971,120.00	
1.03	1.03.01	15	05	5	2	3	Belanja Modal	7,053,844,000.00	Kecamatan Rengat, Batang Cenaku, Lirik, Pasir Penyu, Kelayang, Batang Peranap
1.03	**1.03.01**	**16**					**Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong**	**2,886,208,927.00**	
1.03	1.03.01	16	03	5	2	1	Belanja Pegawai	18,600,000.00	
1.03	1.03.01	16	03	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	304,558,929.00	
1.03	1.03.01	16	03	5	2	3	Belanja Modal	2,563,049,998.00	Kec. Rengat
1.03	**1.03.01**	**18**					**Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan**	**28,605,259,105.00**	
1.03	1.03.01	18	03	5	2	1	Belanja Pegawai	32,600,000.00	
1.03	1.03.01	18	03	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	702,219,280.00	
1.03	1.03.01	18	03	5	2	3	Belanja Modal	27,870,439,825.00	Kecamatan Rengat, Rengat Barat, Kuala Cenaku, Seberida, Batang Gansal, Batang Cenaku, Lirik, Pasir Penyu, Sungai Lala, Lubuk Batu jaya, Rakit Kulim, Kelayang, Peranap, Batang Peranap
1.03	**1.03.01**	**21**					**Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan**	**2,107,368,850.00**	
1.03	1.03.01	21	01	5	2	1	Belanja Pegawai	15,100,000.00	
1.03	1.03.01	21	01	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	92,268,850.00	
1.03	1.03.01	21	01	5	2	3	Belanja Modal	2,000,000,000.00	
1.03	**1.03.01**	**22**					**Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan dan Jembatan**	**244,000,000.00**	
1.03	1.03.01	22	04	5	2	1	Belanja Pegawai	12,700,000.00	
1.03	1.03.01	22	04	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	231,300,000.00	
1.03	**1.03.01**	**23**					**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan**	**636,272,205.00**	
1.03	1.03.01	23	06	5	2	1	Belanja Pegawai	121,200,000.00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1							2	3	4
1.03	1.03.01	23	06	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	98,966,750.00	
1.03	1.03.01	23	06	5	2	3	Belanja Modal	39,754,000.00	
1.03	1.03.01	23	10	5	2	1	Belanja Pegawai	21,700,000.00	
1.03	1.03.01	23	10	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	354,651,455.00	
1.03	**1.03.01**	**24**					**Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya**	**10,174,915,978.00**	
1.03	1.03.01	24	09	5	2	1	Belanja Pegawai	21,850,000.00	
1.03	1.03.01	24	09	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	271,244,590.00	
1.03	1.03.01	24	09	5	2	3	Belanja Modal	756,000,000.00	
1.03	1.03.01	24	10	5	2	1	Belanja Pegawai	35,850,000.00	
1.03	1.03.01	24	10	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	458,378,040.00	
1.03	1.03.01	24	10	5	2	3	Belanja Modal	7,740,251,268.00	Kecamatan Kuala Cenaku, Rengat, Rengat Barat, Seberida, Rakit Kulim.
1.03	1.03.01	24	15	5	2	1	Belanja Pegawai	72,050,000.00	
1.03	1.03.01	24	15	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	819,292,080.00	
1.03	**1.03.01**	**27**					**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah**	**5,965,788,729.00**	
1.03	1.03.01	27	06	5	2	1	Belanja Pegawai	37,500,000.00	
1.03	1.03.01	27	06	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	691,688,729.00	
1.03	1.03.01	27	06	5	2	3	Belanja Modal	5,236,600,000.00	
1.03	**1.03.01**	**28**					**Program Pengendalian Banjir**	**2,661,996,180.00**	
1.03	1.03.01	28	04	5	2	1	Belanja Pegawai	27,850,000.00	
1.03	1.03.01	28	04	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	216,070,680.00	
1.03	1.03.01	28	04	5	2	3	Belanja Modal	2,418,075,500.00	Kec. Kuala Cenaku, Rengat, Rengat Barat dan Kelayang
1.03	**1.03.01**	**29**					**Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh**	**9,110,313,889.00**	
1.03	1.03.01	29	02	5	2	1	Belanja Pegawai	31,100,000.00	
1.03	1.03.01	29	02	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	351,834,854.00	
1.03	1.03.01	29	02	5	2	3	Belanja Modal	8,471,057,000.00	Kecamatan Rengat, Rengat Barat, Kec. Pasir Penyu, Kelayang, Batang Cenaku, Peranap, Seberida dan Lirik.
1.03	1.03.01	29	03	5	2	1	Belanja Pegawai	11,000,000.00	
1.03	1.03.01	29	03	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	245,322,035.00	
1.03	**1.03.01**	**30**					**Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan**	**4,817,413,635.00**	
1.03	1.03.01	30	02	5	2	1	Belanja Pegawai	26,600,000.00	
1.03	1.03.01	30	02	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	1,385,478,677.00	
1.03	1.03.01	30	06	5	2	1	Belanja Pegawai	86,600,000.00	
1.03	1.03.01	30	06	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	2,530,053,183.00	
1.03	1.03.01	30	06	5	2	3	Belanja Modal	250,000,000.00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1							2	3	4
1.03	1.03.01	30	08	5	2	1	Belanja Pegawai	105,800,000.00	
1.03	1.03.01	30	08	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	403,881,775.00	
1.03	1.03.01	30	08	5	2	3	Belanja Modal	29,000,000.00	
1.04	**1.03.01**	**00**	**00**	**5**	**2**		**Belanja Langsung Urusan Wajib PERUMAHAN**	**5,368,372,883.00**	
1.04	**1.03.01**	**15**					**Program Pengembangan Perumahan**	**3,559,334,206.00**	
1.04	1.03.01	15	1.				Penyusunan Norma Standar Pedoman dan Manual (NSPM)	5,368,372,883.00	
1.04	1.03.01	15	02	5	2	1	Belanja Pegawai	11,000,000.00	
1.04	1.03.01	15	02	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	91,076,479.00	
1.04	1.03.01	15	06	5	2	1	Belanja Pegawai	31,600,000.00	
1.04	1.03.01	15	06	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	184,180,050.00	
1.04	1.03.01	15	07	5	2	1	Belanja Pegawai	39,200,000.00	
1.04	1.03.01	15	07	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	3,202,277,677.00	
1.04	**1.03.01**	**16**					**Program Lingkungan Sehat Perumahan**	**1,809,038,677.00**	
1.04	1.03.01	16	02	5	2	1	Belanja Pegawai	14,800,000.00	
1.04	1.03.01	16	02	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	158,240,677.00	
1.04	1.03.01	16	02	5	2	3	Belanja Modal	1,635,998,000.00	
1.05	**1.03.01**	**00**	**00**	**5**	**2**		**Belanja Langsung Urusan Wajib PENATAAN RUANG**	**1,068,286,296.00**	
1.05	**1.03.01**	**15**					**Program Perencanaan Tata Ruang**	**687,494,766.00**	
1.05	1.03.01	15	1.				Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	1,068,286,296.00	
1.05	1.03.01	15	05	5	2	1	Belanja Pegawai	17,100,000.00	
1.05	1.03.01	15	05	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	354,454,106.00	
1.05	1.03.01	15	10	5	2	1	Belanja Pegawai	116,600,000.00	
1.05	1.03.01	15	10	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	199,340,660.00	
1.05	**1.03.01**	**16**					**Program Pemanfaatan Tata Ruang**	**212,241,674.00**	
1.05	1.03.01	16	05	5	2	1	Belanja Pegawai	13,600,000.00	
1.05	1.03.01	16	05	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	95,475,770.00	
1.05	1.03.01	16	07	5	2	1	Belanja Pegawai	47,100,000.00	
1.05	1.03.01	16	07	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	56,065,904.00	
1.05	**1.03.01**	**17**					**Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang**	**168,549,856.00**	
1.05	1.03.01	17	08	5	2	1	Belanja Pegawai	9,500,000.00	
1.05	1.03.01	17	08	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	159,049,856.00	
1.08	**1.03.01**	**00**	**00**	**5**	**2**		**Belanja Langsung Urusan Wajib LINGKUNGAN HIDUP**	**5,782,705,564.00**	
1.08	**1.03.01**	**15**					**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**	**4,532,326,885.00**	
1.08	1.03.01	15	1.				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	5,782,705,564.00	
1.08	1.03.01	15	02	5	2	1	Belanja Pegawai	2,015,825,000.00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1							2	3	4
1.08	1.03.01	15	02	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	1,041,944,140.00	
1.08	1.03.01	15	02	5	2	3	Belanja Modal	10,000,000.00	
1.08	1.03.01	15	04	5	2	1	Belanja Pegawai	23,100,000.00	
1.08	1.03.01	15	04	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	191,457,745.00	
1.08	1.03.01	15	04	5	2	3	Belanja Modal	1,250,000,000.00	
1.08	**1.03.01**	**24**					**Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)**	**1,250,378,679.00**	
1.08	1.03.01	24	07	5	2	1	Belanja Pegawai	21,850,000.00	
1.08	1.03.01	24	07	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	228,528,679.00	
1.08	1.03.01	24	07	5	2	3	Belanja Modal	1,000,000,000.00	Kecamatan Rengat
1.20	**1.03.01**	**00**	**00**	**5**	**2**		**Belanja Langsung Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan**	**50,000,000.00**	
1.20	**1.03.01**	**17**					**Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**50,000,000.00**	
1.20	1.03.01	17	1.				Implementasi Sistem Informasi Manajemen Tata Usaha Keuangan Dinas Daerah	50,000,000.00	
1.20	1.03.01	17	45	5	2	1	Belanja Pegawai	1,700,000.00	
1.20	1.03.01	17	45	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	48,300,000.00	
							Jumlah Belanja	**173,674,527,343.83**	
							Surplus / (Defisit)	**(170,849,527,343.83)**	
1.03	**1.03.01**	**00**	**00**				**Pembiayaan Daerah**		

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06 - Urusan Wajib PERENCANAAN PEMBANGUNAN

ORGANISASI : 1.06.01 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Indragiri Hulu

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1							2	3	4
1.06	**1.06.01**	**00**	**00**				**Pendapatan Daerah**		
1.06	**1.06.01**	**00**	**00**	**5**			**Belanja Daerah**	**17,189,097,935.00**	
1.06	**1.06.01**	**00**	**00**	**5**	**1**		**Belanja Tidak Langsung**	**4,878,553,681.00**	
1.06	1.06.01	00	00	5	1	1	Belanja Pegawai	4,878,553,681.00	Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2005 tentang Perubahan Ke-7 atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1997 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
	1.06.01	**00**	**00**	**5**	**2**		**Belanja Langsung**	**12,310,544,254.00**	
1.06	**1.06.01**	**00**	**00**	**5**	**2**		**Belanja Langsung Urusan Wajib PERENCANAAN PEMBANGUNAN**	**11,664,343,554.00**	
1.06	**1.06.01**	**01**					**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**2,024,572,464.00**	
1.06	1.06.01	01	1.				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11,664,343,554.00	
1.06	1.06.01	01	01	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	14,050,000.00	
1.06	1.06.01	01	02	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	105,000,000.00	
1.06	1.06.01	01	08	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	21,312,990.00	
1.06	1.06.01	01	09	5	2	1	Belanja Pegawai	1,700,000.00	
1.06	1.06.01	01	09	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	85,000,000.00	
1.06	1.06.01	01	10	5	2	1	Belanja Pegawai	3,600,000.00	
1.06	1.06.01	01	10	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	94,391,925.00	
1.06	1.06.01	01	11	5	2	1	Belanja Pegawai	3,600,000.00	
1.06	1.06.01	01	11	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	168,393,449.00	
1.06	1.06.01	01	13	5	2	1	Belanja Pegawai	3,600,000.00	
1.06	1.06.01	01	13	5	2	3	Belanja Modal	326,044,100.00	
1.06	1.06.01	01	15	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	100,000,000.00	
1.06	1.06.01	01	17	5	2	1	Belanja Pegawai	3,600,000.00	
1.06	1.06.01	01	17	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	185,250,000.00	
1.06	1.06.01	01	18	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	719,330,000.00	
1.06	1.06.01	01	19	5	2	1	Belanja Pegawai	100,200,000.00	
1.06	1.06.01	01	20	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	89,500,000.00	
1.06	**1.06.01**	**02**					**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**953,710,000.00**	
1.06	1.06.01	02	05	5	2	3	Belanja Modal	195,000,000.00	
1.06	1.06.01	02	06	5	2	1	Belanja Pegawai	1,700,000.00	
1.06	1.06.01	02	06	5	2	3	Belanja Modal	35,000,000.00	
1.06	1.06.01	02	23	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	244,680,000.00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1							2	3	4
1.06	1.06.01	02	24	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	47,430,000.00	
1.06	1.06.01	02	40	5	2	1	Belanja Pegawai	1,700,000.00	
1.06	1.06.01	02	40	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	40,000,000.00	
1.06	1.06.01	02	42	5	2	1	Belanja Pegawai	4,800,000.00	
1.06	1.06.01	02	42	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	383,400,000.00	
1.06	**1.06.01**	**05**					**Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**	**250,000,000.00**	
1.06	1.06.01	05	03	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	250,000,000.00	
1.06	**1.06.01**	**06**					**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**15,050,000.00**	
1.06	1.06.01	06	01	5	2	1	Belanja Pegawai	8,000,000.00	
1.06	1.06.01	06	02	5	2	1	Belanja Pegawai	2,350,000.00	
1.06	1.06.01	06	03	5	2	1	Belanja Pegawai	2,350,000.00	
1.06	1.06.01	06	04	5	2	1	Belanja Pegawai	2,350,000.00	
1.06	**1.06.01**	**15**					**Program Pengembangan Data/Informasi**	**289,725,050.00**	
1.06	1.06.01	15	02	5	2	1	Belanja Pegawai	33,450,000.00	
1.06	1.06.01	15	02	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	29,987,000.00	
1.06	1.06.01	15	07	5	2	1	Belanja Pegawai	26,100,000.00	
1.06	1.06.01	15	07	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	200,188,050.00	
1.06	**1.06.01**	**16**					**Program Kerjasama Pembangunan**	**619,160,600.00**	
1.06	1.06.01	16	04	5	2	1	Belanja Pegawai	173,200,000.00	
1.06	1.06.01	16	04	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	72,212,800.00	
1.06	1.06.01	16	07	5	2	1	Belanja Pegawai	110,625,000.00	
1.06	1.06.01	16	07	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	263,122,800.00	
1.06	**1.06.01**	**19**					**Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar**	**329,169,340.00**	
1.06	1.06.01	19	09	5	2	1	Belanja Pegawai	83,900,000.00	
1.06	1.06.01	19	09	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	245,269,340.00	
1.06	**1.06.01**	**20**					**Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah**	**1,043,388,270.00**	
1.06	1.06.01	20	01	5	2	1	Belanja Pegawai	8,000,000.00	
1.06	1.06.01	20	01	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	557,382,980.00	
1.06	1.06.01	20	02	5	2	1	Belanja Pegawai	79,200,000.00	
1.06	1.06.01	20	02	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	398,805,290.00	
1.06	**1.06.01**	**21**					**Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	**1,789,588,960.00**	
1.06	1.06.01	21	09	5	2	1	Belanja Pegawai	357,000,000.00	
1.06	1.06.01	21	09	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	507,562,190.00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1							2	3	4
1.06	1.06.01	21	13	5	2	1	Belanja Pegawai	21,800,000.00	
1.06	1.06.01	21	13	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	605,442,190.00	
1.06	1.06.01	21	15	5	2	1	Belanja Pegawai	59,500,000.00	
1.06	1.06.01	21	15	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	238,284,580.00	
1.06	**1.06.01**	**22**					**Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi**	**1,512,022,650.00**	
1.06	1.06.01	22	02	5	2	1	Belanja Pegawai	14,500,000.00	
1.06	1.06.01	22	02	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	332,013,500.00	
1.06	1.06.01	22	03	5	2	1	Belanja Pegawai	16,000,000.00	
1.06	1.06.01	22	03	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	233,635,620.00	
1.06	1.06.01	22	04	5	2	1	Belanja Pegawai	17,300,000.00	
1.06	1.06.01	22	04	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	603,324,040.00	
1.06	1.06.01	22	06	5	2	1	Belanja Pegawai	17,600,000.00	
1.06	1.06.01	22	06	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	277,649,490.00	
1.06	**1.06.01**	**23**					**Program Perencanaan Sosial Budaya**	**1,077,472,620.00**	
1.06	1.06.01	23	02	5	2	1	Belanja Pegawai	16,000,000.00	
1.06	1.06.01	23	02	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	509,850,620.00	
1.06	1.06.01	23	03	5	2	1	Belanja Pegawai	27,500,000.00	
1.06	1.06.01	23	03	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	524,122,000.00	
1.06	**1.06.01**	**24**					**Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam**	**1,760,483,600.00**	
1.06	1.06.01	24	01	5	2	1	Belanja Pegawai	16,000,000.00	
1.06	1.06.01	24	01	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	553,635,620.00	
1.06	1.06.01	24	02	5	2	1	Belanja Pegawai	16,000,000.00	
1.06	1.06.01	24	02	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	374,362,500.00	
1.06	1.06.01	24	04	5	2	1	Belanja Pegawai	21,500,000.00	
1.06	1.06.01	24	04	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	378,798,340.00	
1.06	1.06.01	24	05	5	2	1	Belanja Pegawai	78,400,000.00	
1.06	1.06.01	24	05	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	321,787,140.00	
1.20	**1.06.01**	**00**	**00**	**5**	**2**		**Belanja Langsung Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan**	**50,000,000.00**	
1.20	**1.06.01**	**17**					**Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**50,000,000.00**	
1.20	1.06.01	17	1.				Implementasi Sistem Informasi Manajemen Tata Usaha Keuangan Dinas Daerah	50,000,000.00	
1.20	1.06.01	17	45	5	2	1	Belanja Pegawai	1,700,000.00	
1.20	1.06.01	17	45	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	48,300,000.00	
1.23	**1.06.01**	**00**	**00**	**5**	**2**		**Belanja Langsung Urusan Wajib STATISTIK**	**596,200,700.00**	
1.23	**1.06.01**	**15**					**Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah**	**596,200,700.00**	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1							2	3	4
1.23	1.06.01	15	1.				Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	596,200,700.00	
1.23	1.06.01	15	01	5	2	1	Belanja Pegawai	100,950,000.00	
1.23	1.06.01	15	01	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	101,634,700.00	
1.23	1.06.01	15	02	5	2	1	Belanja Pegawai	128,600,000.00	
1.23	1.06.01	15	02	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	107,464,000.00	
1.23	1.06.01	15	03	5	2	1	Belanja Pegawai	82,400,000.00	
1.23	1.06.01	15	03	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	75,152,000.00	
							Jumlah Belanja	**17,189,097,935.00**	
							Surplus / (Defisit)	**(17,189,097,935.00)**	
1.06	**1.06.01**	**00**	**00**				**Pembiayaan Daerah**		

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.07 - Urusan Wajib PERHUBUNGAN

ORGANISASI : 1.07.01 - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indragiri Hulu

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1							2	3	4
1.07	**1.07.01**	**00**	**00**	**4**			**Pendapatan Daerah**	**784,000,000.00**	
1.07	**1.07.01**	**00**	**00**	**4**	**1**		**Pendapatan Asli Daerah**	**784,000,000.00**	
1.07	1.07.01	00	00	4	1	2	Hasil Retribusi Daerah	784,000,000.00	
							Jumlah Pendapatan	**784,000,000.00**	
1.07	**1.07.01**	**00**	**00**	**5**			**Belanja Daerah**	**7,377,434,492.00**	
1.07	**1.07.01**	**00**	**00**	**5**	**1**		**Belanja Tidak Langsung**	**2,630,162,792.00**	
1.07	1.07.01	00	00	5	1	1	Belanja Pegawai	2,630,162,792.00	Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2005 tentang Perubahan Ke-7 atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1997 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
	1.07.01	**00**	**00**	**5**	**2**		**Belanja Langsung**	**4,747,271,700.00**	
1.07	**1.07.01**	**00**	**00**	**5**	**2**		**Belanja Langsung Urusan Wajib PERHUBUNGAN**	**4,126,093,610.00**	
1.07	**1.07.01**	**01**					**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**2,071,302,550.00**	
1.07	1.07.01	01	1.				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,126,093,610.00	
1.07	1.07.01	01	01	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	2,943,000.00	
1.07	1.07.01	01	02	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	400,797,600.00	
1.07	1.07.01	01	08	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	11,273,700.00	
1.07	1.07.01	01	10	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	42,471,700.00	
1.07	1.07.01	01	11	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	190,340,550.00	
1.07	1.07.01	01	12	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	13,080,000.00	
1.07	1.07.01	01	15	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	27,900,000.00	
1.07	1.07.01	01	17	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	32,400,000.00	
1.07	1.07.01	01	18	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	678,396,000.00	
1.07	1.07.01	01	19	5	2	1	Belanja Pegawai	337,200,000.00	
1.07	1.07.01	01	20	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	334,500,000.00	
1.07	**1.07.01**	**02**					**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**996,985,650.00**	
1.07	1.07.01	02	05	5	2	1	Belanja Pegawai	5,500,000.00	
1.07	1.07.01	02	05	5	2	3	Belanja Modal	75,000,000.00	
1.07	1.07.01	02	10	5	2	1	Belanja Pegawai	5,500,000.00	
1.07	1.07.01	02	10	5	2	3	Belanja Modal	97,025,000.00	
1.07	1.07.01	02	22	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	74,900,000.00	
1.07	1.07.01	02	24	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	231,105,000.00	
1.07	1.07.01	02	28	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	18,750,000.00	
1.07	1.07.01	02	42	5	2	1	Belanja Pegawai	10,100,000.00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1							2	3	4
1.07	1.07.01	02	42	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	32,810,650.00	
1.07	1.07.01	02	42	5	2	3	Belanja Modal	446,295,000.00	
1.07	**1.07.01**	**05**					**Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**	**150,000,000.00**	
1.07	1.07.01	05	01	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	150,000,000.00	
1.07	**1.07.01**	**06**					**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**17,550,000.00**	
1.07	1.07.01	06	01	5	2	1	Belanja Pegawai	9,000,000.00	
1.07	1.07.01	06	02	5	2	1	Belanja Pegawai	2,850,000.00	
1.07	1.07.01	06	03	5	2	1	Belanja Pegawai	2,850,000.00	
1.07	1.07.01	06	04	5	2	1	Belanja Pegawai	2,850,000.00	
1.07	**1.07.01**	**15**					**Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan**	**215,599,160.00**	
1.07	1.07.01	15	06	5	2	1	Belanja Pegawai	10,100,000.00	
1.07	1.07.01	15	06	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	14,911,160.00	
1.07	1.07.01	15	06	5	2	3	Belanja Modal	190,588,000.00	
1.07	**1.07.01**	**17**					**Program Peningkatan Pelayanan Angkutan**	**110,270,000.00**	
1.07	1.07.01	17	05	5	2	1	Belanja Pegawai	5,300,000.00	
1.07	1.07.01	17	05	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	104,970,000.00	
1.07	**1.07.01**	**19**					**Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas**	**564,386,250.00**	
1.07	1.07.01	19	01	5	2	1	Belanja Pegawai	11,900,000.00	
1.07	1.07.01	19	01	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	37,611,250.00	
1.07	1.07.01	19	01	5	2	3	Belanja Modal	514,875,000.00	
1.20	**1.07.01**	**00**	**00**	**5**	**2**		**Belanja Langsung Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan**	**50,000,000.00**	
1.20	**1.07.01**	**17**					**Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**50,000,000.00**	
1.20	1.07.01	17	1.				Implementasi Sistem Informasi Manajemen Tata Usaha Keuangan Dinas Daerah	50,000,000.00	
1.20	1.07.01	17	45	5	2	1	Belanja Pegawai	1,700,000.00	
1.20	1.07.01	17	45	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	48,300,000.00	
1.25	**1.07.01**	**00**	**00**	**5**	**2**		**Belanja Langsung Urusan Wajib KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**571,178,090.00**	
1.25	**1.07.01**	**15**					**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**	**221,178,090.00**	
1.25	1.07.01	15	1.				Kajian dan Pengembangan Sistem Informasi	571,178,090.00	
1.25	1.07.01	15	06	5	2	1	Belanja Pegawai	37,600,000.00	
1.25	1.07.01	15	06	5	2	3	Belanja Modal	183,578,090.00	
1.25	**1.07.01**	**18**					**Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa**	**350,000,000.00**	
1.25	1.07.01	18	01	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	350,000,000.00	
							Jumlah Belanja	**7,377,434,492.00**	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1							2	3	4
							Surplus / (Defisit)	(6,593,434,492.00)	
1.07	1.07.01	00	00				Pembiayaan Daerah		

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.08 - Urusan Wajib LINGKUNGAN HIDUP

ORGANISASI : 1.08.02 - Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Indragiri Hulu

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1							2	3	4
1.08	**1.08.02**	**00**	**00**				**Pendapatan Daerah**		
1.08	**1.08.02**	**00**	**00**	**5**			**Belanja Daerah**	**4,372,491,259.00**	
1.08	**1.08.02**	**00**	**00**	**5**	**1**		**Belanja Tidak Langsung**	**2,005,300,163.00**	
1.08	1.08.02	00	00	5	1	1	Belanja Pegawai	2,005,300,163.00	Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2005 tentang Perubahan Ke-7 atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1997 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
	1.08.02	**00**	**00**	**5**	**2**		**Belanja Langsung**	**2,367,191,096.00**	
1.08	**1.08.02**	**00**	**00**	**5**	**2**		**Belanja Langsung Urusan Wajib LINGKUNGAN HIDUP**	**2,317,191,096.00**	
1.08	**1.08.02**	**01**					**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**697,217,020.00**	
1.08	1.08.02	01	2.				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,317,191,096.00	
1.08	1.08.02	01	01	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	3,450,000.00	
1.08	1.08.02	01	02	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	66,600,000.00	
1.08	1.08.02	01	06	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	45,600,000.00	
1.08	1.08.02	01	08	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	6,358,500.00	
1.08	1.08.02	01	10	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	38,610,020.00	
1.08	1.08.02	01	11	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	29,512,500.00	
1.08	1.08.02	01	12	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	5,209,000.00	
1.08	1.08.02	01	15	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	5,880,000.00	
1.08	1.08.02	01	17	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	18,900,000.00	
1.08	1.08.02	01	18	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	309,332,000.00	
1.08	1.08.02	01	19	5	2	1	Belanja Pegawai	90,400,000.00	
1.08	1.08.02	01	20	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	77,365,000.00	
1.08	**1.08.02**	**02**					**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**198,568,376.00**	
1.08	1.08.02	02	05	5	2	1	Belanja Pegawai	1,700,000.00	
1.08	1.08.02	02	05	5	2	3	Belanja Modal	31,056,376.00	
1.08	1.08.02	02	07	5	2	1	Belanja Pegawai	2,400,000.00	
1.08	1.08.02	02	07	5	2	3	Belanja Modal	110,812,000.00	
1.08	1.08.02	02	28	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	27,600,000.00	
1.08	1.08.02	02	42	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	25,000,000.00	
1.08	**1.08.02**	**03**					**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**29,580,000.00**	
1.08	1.08.02	03	02	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	29,580,000.00	
1.08	**1.08.02**	**05**					**Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**	**55,500,000.00**	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1							2	3	4
1.08	1.08.02	05	03	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	55,500,000.00	
1.08	**1.08.02**	**06**					**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**17,550,000.00**	
1.08	1.08.02	06	01	5	2	1	Belanja Pegawai	9,000,000.00	
1.08	1.08.02	06	02	5	2	1	Belanja Pegawai	2,850,000.00	
1.08	1.08.02	06	03	5	2	1	Belanja Pegawai	2,850,000.00	
1.08	1.08.02	06	04	5	2	1	Belanja Pegawai	2,850,000.00	
1.08	**1.08.02**	**15**					**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**	**71,225,000.00**	
1.08	1.08.02	15	10	5	2	1	Belanja Pegawai	9,875,000.00	
1.08	1.08.02	15	10	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	61,350,000.00	
1.08	**1.08.02**	**16**					**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**	**948,045,600.00**	
1.08	1.08.02	16	01	5	2	1	Belanja Pegawai	9,625,000.00	
1.08	1.08.02	16	01	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	43,260,000.00	
1.08	1.08.02	16	01	5	2	3	Belanja Modal	7,475,000.00	
1.08	1.08.02	16	03	5	2	1	Belanja Pegawai	9,100,000.00	
1.08	1.08.02	16	03	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	86,250,000.00	
1.08	1.08.02	16	04	5	2	1	Belanja Pegawai	8,800,000.00	
1.08	1.08.02	16	04	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	112,200,000.00	
1.08	1.08.02	16	05	5	2	1	Belanja Pegawai	16,475,000.00	
1.08	1.08.02	16	05	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	52,881,600.00	
1.08	1.08.02	16	05	5	2	3	Belanja Modal	31,265,000.00	
1.08	1.08.02	16	06	5	2	1	Belanja Pegawai	10,175,000.00	
1.08	1.08.02	16	06	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	80,825,000.00	
1.08	1.08.02	16	07	5	2	1	Belanja Pegawai	14,400,000.00	
1.08	1.08.02	16	07	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	168,817,000.00	
1.08	1.08.02	16	11	5	2	1	Belanja Pegawai	11,075,000.00	
1.08	1.08.02	16	11	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	48,725,000.00	
1.08	1.08.02	16	11	5	2	3	Belanja Modal	45,000,000.00	
1.08	1.08.02	16	14	5	2	1	Belanja Pegawai	9,900,000.00	
1.08	1.08.02	16	14	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	103,031,000.00	
1.08	1.08.02	16	16	5	2	1	Belanja Pegawai	8,800,000.00	
1.08	1.08.02	16	16	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	69,966,000.00	
1.08	**1.08.02**	**17**					**Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam**	**84,535,100.00**	
1.08	1.08.02	17	06	5	2	1	Belanja Pegawai	12,850,000.00	
1.08	1.08.02	17	06	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	38,810,100.00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1							2	3	4
1.08	1.08.02	17	06	5	2	3	Belanja Modal	32,875,000.00	
1.08	**1.08.02**	**19**					**Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**	**214,970,000.00**	
1.08	1.08.02	19	01	5	2	1	Belanja Pegawai	8,925,000.00	
1.08	1.08.02	19	01	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	116,095,000.00	
1.08	1.08.02	19	02	5	2	1	Belanja Pegawai	9,100,000.00	
1.08	1.08.02	19	02	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	80,850,000.00	
1.20	**1.08.02**	**00**	**00**	**5**	**2**		**Belanja Langsung Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan**	**50,000,000.00**	
1.20	**1.08.02**	**17**					**Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**50,000,000.00**	
1.20	1.08.02	17	2.				Implementasi Sistem Informasi Manajemen Tata Usaha Keuangan Dinas Daerah	50,000,000.00	
1.20	1.08.02	17	45	5	2	1	Belanja Pegawai	1,700,000.00	
1.20	1.08.02	17	45	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	48,300,000.00	
							Jumlah Belanja	**4,372,491,259.00**	
							Surplus / (Defisit)	**(4,372,491,259.00)**	
1.08	**1.08.02**	**00**	**00**				**Pembiayaan Daerah**		

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.10 - Urusan Wajib KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

ORGANISASI : 1.10.01 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1							2	3	4
1.10	**1.10.01**	**00**	**00**	**4**			**Pendapatan Daerah**	**110,000,000.00**	
1.10	**1.10.01**	**00**	**00**	**4**	**1**		**Pendapatan Asli Daerah**	**110,000,000.00**	
1.10	1.10.01	00	00	4	1	2	Hasil Retribusi Daerah	110,000,000.00	
							Jumlah Pendapatan	**110,000,000.00**	
1.10	**1.10.01**	**00**	**00**	**5**			**Belanja Daerah**	**10,321,081,165.00**	
1.10	**1.10.01**	**00**	**00**	**5**	**1**		**Belanja Tidak Langsung**	**2,794,146,798.00**	
1.10	1.10.01	00	00	5	1	1	Belanja Pegawai	2,794,146,798.00	Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2005 tentang Perubahan Ke-7 atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1997 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
	1.10.01	**00**	**00**	**5**	**2**		**Belanja Langsung**	**7,526,934,367.00**	
1.10	**1.10.01**	**00**	**00**	**5**	**2**		**Belanja Langsung Urusan Wajib KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**	**7,476,934,367.00**	
1.10	**1.10.01**	**01**					**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**2,367,825,242.00**	
1.10	1.10.01	01	1.				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7,476,934,367.00	
1.10	1.10.01	01	01	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	2,034,000.00	
1.10	1.10.01	01	02	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	60,000,000.00	
1.10	1.10.01	01	06	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	466,775,600.00	
1.10	1.10.01	01	08	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	4,648,800.00	
1.10	1.10.01	01	09	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	119,600,000.00	
1.10	1.10.01	01	10	5	2	1	Belanja Pegawai	1,800,000.00	
1.10	1.10.01	01	10	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	69,617,300.00	
1.10	1.10.01	01	11	5	2	1	Belanja Pegawai	4,200,000.00	
1.10	1.10.01	01	11	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	435,748,800.00	
1.10	1.10.01	01	12	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	38,540,500.00	
1.10	1.10.01	01	13	5	2	1	Belanja Pegawai	3,600,000.00	
1.10	1.10.01	01	13	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	1,000,000.00	
1.10	1.10.01	01	13	5	2	3	Belanja Modal	280,947,742.00	
1.10	1.10.01	01	15	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	14,400,000.00	
1.10	1.10.01	01	17	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	36,160,500.00	
1.10	1.10.01	01	18	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	507,452,000.00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1							2	3	4
1.10	1.10.01	01	19	5	2	1	Belanja Pegawai	321,300,000.00	
1.10	**1.10.01**	**02**					**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**299,164,400.00**	
1.10	1.10.01	02	05	5	2	1	Belanja Pegawai	3,600,000.00	
1.10	1.10.01	02	05	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	1,000,000.00	
1.10	1.10.01	02	05	5	2	3	Belanja Modal	54,000,000.00	
1.10	1.10.01	02	10	5	2	1	Belanja Pegawai	2,500,000.00	
1.10	1.10.01	02	10	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	2,000,000.00	
1.10	1.10.01	02	10	5	2	3	Belanja Modal	147,864,400.00	
1.10	1.10.01	02	42	5	2	1	Belanja Pegawai	7,200,000.00	
1.10	1.10.01	02	42	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	1,000,000.00	
1.10	1.10.01	02	42	5	2	3	Belanja Modal	80,000,000.00	
1.10	**1.10.01**	**03**					**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**91,877,392.00**	
1.10	1.10.01	03	05	5	2	1	Belanja Pegawai	700,000.00	
1.10	1.10.01	03	05	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	91,177,392.00	
1.10	**1.10.01**	**06**					**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**31,900,000.00**	
1.10	1.10.01	06	01	5	2	1	Belanja Pegawai	31,900,000.00	
1.10	**1.10.01**	**15**					**Program Penataan Administrasi Kependudukan**	**4,686,167,333.00**	
1.10	1.10.01	15	01	5	2	1	Belanja Pegawai	18,100,000.00	
1.10	1.10.01	15	01	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	235,668,000.00	
1.10	1.10.01	15	01	5	2	3	Belanja Modal	895,842,333.00	
1.10	1.10.01	15	05	5	2	1	Belanja Pegawai	13,200,000.00	
1.10	1.10.01	15	05	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	371,620,000.00	
1.10	1.10.01	15	08	5	2	1	Belanja Pegawai	892,000,000.00	
1.10	1.10.01	15	08	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	1,804,375,000.00	
1.10	1.10.01	15	08	5	2	3	Belanja Modal	295,000,000.00	
1.10	1.10.01	15	13	5	2	1	Belanja Pegawai	43,100,000.00	
1.10	1.10.01	15	13	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	117,262,000.00	
1.20	**1.10.01**	**00**	**00**	**5**	**2**		**Belanja Langsung Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan**	**50,000,000.00**	
1.20	**1.10.01**	**17**					**Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**50,000,000.00**	
1.20	1.10.01	17	1.				Implementasi Sistem Informasi Manajemen Tata Usaha Keuangan Dinas Daerah	50,000,000.00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1							2	3	4
1.20	1.10.01	17	45	5	2	1	Belanja Pegawai	1,700,000.00	
1.20	1.10.01	17	45	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	48,300,000.00	
							Jumlah Belanja	**10,321,081,165.00**	
							Surplus / (Defisit)	**(10,211,081,165.00)**	
1.10	**1.10.01**	**00**	**00**				**Pembiayaan Daerah**		

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.12 - Urusan Wajib KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

ORGANISASI : 1.12.01 - Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Indragiri Hulu

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1							2	3	4
1.12	**1.12.01**	**00**	**00**	**4**			**Pendapatan Daerah**		
1.12	**1.12.01**	**00**	**00**	**4**	**1**		**Pendapatan Asli Daerah**		
1.12	1.12.01	00	00	4	1	2	Hasil Retribusi Daerah		
1.12	1.12.01	00	00	4	1	4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		
							Jumlah Pendapatan		
1.12	**1.12.01**	**00**	**00**	**5**			**Belanja Daerah**	**5,874,205,787.00**	
1.12	**1.12.01**	**00**	**00**	**5**	**1**		**Belanja Tidak Langsung**	**1,775,197,001.00**	
1.12	1.12.01	00	00	5	1	1	Belanja Pegawai	1,775,197,001.00	Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2005 tentang Perubahan Ke-7 atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1997 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
	1.12.01	**00**	**00**	**5**	**2**		**Belanja Langsung**	**4,099,008,786.00**	
1.12	**1.12.01**	**00**	**00**	**5**	**2**		**Belanja Langsung Urusan Wajib KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA**	**2,798,897,386.00**	
1.12	**1.12.01**	**01**					**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**1,467,195,666.00**	
1.12	1.12.01	01	1.				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,798,897,386.00	
1.12	1.12.01	01	01	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	1,200,000.00	
1.12	1.12.01	01	02	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	24,000,000.00	
1.12	1.12.01	01	06	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	47,080,800.00	
1.12	1.12.01	01	08	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	6,635,520.00	
1.12	1.12.01	01	09	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	13,800,000.00	
1.12	1.12.01	01	10	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	60,501,952.00	
1.12	1.12.01	01	11	5	2	1	Belanja Pegawai	1,700,000.00	
1.12	1.12.01	01	11	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	28,495,100.00	
1.12	1.12.01	01	12	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	9,140,000.00	
1.12	1.12.01	01	13	5	2	1	Belanja Pegawai	2,500,000.00	
1.12	1.12.01	01	13	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	500,000.00	
1.12	1.12.01	01	13	5	2	3	Belanja Modal	145,528,294.00	
1.12	1.12.01	01	14	5	2	1	Belanja Pegawai	2,500,000.00	
1.12	1.12.01	01	14	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	1,600,000.00	
1.12	1.12.01	01	14	5	2	3	Belanja Modal	15,000,000.00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1							2	3	4
1.12	1.12.01	01	15	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	7,300,000.00	
1.12	1.12.01	01	17	5	2	1	Belanja Pegawai	1,700,000.00	
1.12	1.12.01	01	17	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	49,500,000.00	
1.12	1.12.01	01	18	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	267,579,000.00	
1.12	1.12.01	01	19	5	2	1	Belanja Pegawai	679,000,000.00	
1.12	1.12.01	01	20	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	101,935,000.00	
1.12	**1.12.01**	**02**					**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**139,479,150.00**	
1.12	1.12.01	02	05	5	2	1	Belanja Pegawai	2,500,000.00	
1.12	1.12.01	02	05	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	2,000,000.00	
1.12	1.12.01	02	05	5	2	3	Belanja Modal	134,979,150.00	
1.12	**1.12.01**	**03**					**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**51,375,870.00**	
1.12	1.12.01	03	02	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	51,375,870.00	
1.12	**1.12.01**	**05**					**Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**	**150,000,000.00**	
1.12	1.12.01	05	01	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	150,000,000.00	
1.12	**1.12.01**	**06**					**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**23,700,000.00**	
1.12	1.12.01	06	01	5	2	1	Belanja Pegawai	9,000,000.00	
1.12	1.12.01	06	02	5	2	1	Belanja Pegawai	2,850,000.00	
1.12	1.12.01	06	03	5	2	1	Belanja Pegawai	9,000,000.00	
1.12	1.12.01	06	04	5	2	1	Belanja Pegawai	2,850,000.00	
1.12	**1.12.01**	**15**					**Program Keluarga Berencana**	**602,563,150.00**	
1.12	1.12.01	15	01	5	2	1	Belanja Pegawai	38,400,000.00	
1.12	1.12.01	15	01	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	318,345,000.00	
1.12	1.12.01	15	05	5	2	1	Belanja Pegawai	21,225,000.00	
1.12	1.12.01	15	05	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	80,470,150.00	
1.12	1.12.01	15	09	5	2	1	Belanja Pegawai	19,525,000.00	
1.12	1.12.01	15	09	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	124,598,000.00	
1.12	**1.12.01**	**19**					**Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat**	**163,571,100.00**	
1.12	1.12.01	19	01	5	2	1	Belanja Pegawai	46,800,000.00	
1.12	1.12.01	19	01	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	116,771,100.00	
1.12	**1.12.01**	**20**					**Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR**	**95,768,150.00**	